



**Pemerintah Kabupaten  
Kotawaringin Timur**

# **RENJA RENCANA KERJA TAHUN 2023**

**DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

## KATA PENGANTAR

Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Sebagai sebuah investasi dan menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia, dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Tolak ukur pencapaiannya ditandai oleh penduduknya yang memiliki derajat kesehatan yang optimal, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki perlindungan atau jaminan kesehatan ketika mengalami musibah kesakitan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan Satuan Kerja Organisasi Daerah yang mengemban tanggung jawab untuk mengkoordinir dan melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut SOPD Dinas Kesehatan menyusun rencana kerja pertahun. Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja tersebut setelah mendengarkan masukan masyarakat melalui forum musrenbang dan forum SOPD dan melalui pembahasan dengan tim anggaran maka disusunlah Rancangan Rencana Kerja tahun 2023.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023. Beberapa kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan telah dirumuskan dalam rencana kerja Tahun 2023 sesuai dengan rencana Pencapaian Indikator Kinerja SOPD maupun penetapan kinerja SOPD Dinas Kesehatan.

Dengan tersusunya Rencana Kerja ini pelaksanaan kegiatan strategis dan kegiatan pendukung lainnya dapat berjalan dengan baik dan berdampak pada meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin timur.

Semoga Rancangan Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2023 ini dapat dilaksanakan secara optimal dan berdaya guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sampit,  
KEPALA DINAS



UMAR KADERI, SH, M.Sc  
NIP. 19670716 198703 1 004

## DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	5
D. Sistematika Penulisan .....	6
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU SEBELUMNYA .....	7
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu .....	4
B. Analisis Kinerja Pelayanan SOPD Tahun Lalu .....	6
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .....	31
D. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	34
E. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	37
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	39
A. Tujuan .....	39
B. Sasaran .....	40
C. Program dan Kegiatan .....	40
III. RENCANA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	48
A. Rencana Kerja .....	48
B. Pendanaan Bidang Kesehatan .....	48
IV. PENUTUP .....	50

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap manusia yang harus dilindungi, dipelihara dan ditingkatkan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu pembangunan kesehatan harus tetap dilaksanakan secara berkesinambungan dan simultan sesuai dengan kesepakatan global, nasional, regional, serta rencana pembangunan jangka panjang dan menengah kabupaten. Oleh karena itu, pembangunan nasional, regional dan daerah harus berwawasan kesehatan yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan.

Kesehatan merupakan rangkaian upaya yang secara sadar dilakukan masyarakat untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Hasilnya dapat dirasakan bila terjadi perubahan ataupun peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam rentang waktu tertentu. Program pembangunan kesehatan yang dilaksanakan selama ini telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara cukup bermakna, walaupun masih dijumpai berbagai hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan kesehatan. Untuk itu pembangunan kesehatan harus tetap dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan kesepakatan global, nasional, serta renstra Kabupaten.

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Nasional. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi dan diharapkan dapat menyentuh semua aspek kehidupan dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang ditandai perilaku bersih dan sehat, hidup dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta seharusnya memiliki derajat kesehatan yang optimal.

Pelayanan Kesehatan sebagai hak asasi dan kebutuhan dasar masyarakat dalam upaya pemenuhannya memerlukan rencana kerja yang sistematis dan terpadu, khususnya agar dapat menuntaskan target-target yang belum tercapai. Penyusunan rencana kerja tersebut diharapkan mampu mengeksplorasi seluruh sumber daya yang ada dengan berlandaskan peraturan dan ketentuan yang

berlaku. Prioritas anggaran akan diarahkan pembiayaannya pada 3 pilar pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu Kegiatan Promotif Preventif, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Akses Jaminan Kesehatan Nasional. Ketersediaan anggaran yang terbatas perlu disikapi sedemikian rupa agar mampu memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan. Untuk itu Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan disusun secara komprehensif dengan berlandaskan prinsip akuntabilitas, asas kepatutan, kepatantasan dan kewajaran serta memenuhi rasa keadilan sesuai sumber daya yang tersedia.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 (Lembaran-Negara No. 65 Tahun 1956).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

yang sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887).
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322).
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178).
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663).
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664).
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
17. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);

18. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. PMDN Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
23. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9); Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 2);
28. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023.

### **C. Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2023 dapat berjalan sesuai dengan kebijakanyang telah ditetapkan.
- b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kerja pada tahun berjalan.
- c. Menyusun kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 adalah untuk :

1. Mendiskripsikan tentang program-program yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan pada tahun berjalan untuk mendukung pencapaian target tujuan, sasaran program dan indikator kinerja kegiatan;
3. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui pengukuran kinerja Dinas Kesehatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan kesehatan daerah;
4. Menjadi dasar bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan;



5. Meningkatkan sistem surveilans dan sistem informasi kesehatan dalam rangka mendukung perencanaan berbasis data dan informasi yang akurat;
6. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
  - A. Latar Belakang
  - B. Dasar Hukum
  - C. Maksud dan Tujuan
  - D. Sistematika Penulisan
- II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Sebelumnya
  - A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
  - B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
    1. Capaian Kinerja Tahun 2020
    2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021
  - C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
  - D. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
  - E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
  - A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
  - B. Tujuan dan Sasaran Reja SKPD
  - C. Program dan Kegiatan
  - D. Indikator Kinerja Sasaran
- IV. Penutup

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN-RENCANA KERJA TAHUN LALU

#### A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Bidang Kesehatan Tahun 2021

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA TAHUN 2021		REALISASI KINERJA TH 2021	
			Rp	%	%	Rp
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penunjang Pemerintah Daerah tersedia	68,924,126,396	82	97	67,074,230,500
1.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Administrasi Keuangan OPD terlaksana	60,798,496,696	100	98	59,878,156,755
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN tersedia	60,798,496,696	100	98	59,878,156,755
1.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlaksana	0	84	0	0
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan perundang-Undangan diimplementasikan	0	75	0	0
1.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksana	1,093,664,700	78	78	850,565,740
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Listrik Kantor tersedia	12,624,000	80	76	9,639,463
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga tersedia	140,213,700	70	51	71,597,300
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dokumen Kantor dicetak / digandakan	31,250,000	85	100	31,250,000
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan/ Peraturan Perundang-Undangan tersedia	32,400,000	75	99	32,120,000
1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Bahan Material Kantor tersedia	45,317,000	80	91	41,224,000
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan/Minum Tamu tersedia	49,000,000	85	70	34,529,600
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terlaksana	782,860,000	85	81	630,205,377

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA TAHUN 2021		REALISASI KINERJA TH 2021	
			Rp	%	%	Rp
1.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jasa penunjang PMD tersedia	6,834,182,000	84	90	6,154,954,655
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat kedinasan terlaksana	1,950,000	80	66	1,294,000
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik, Air tersedia	169,879,900	100	87	148,629,975
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan Kantor tersedia	47,150,000	75	57	27,020,000
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia	6,615,202,100	80	90	5,978,010,680
1.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BMD penunjang terpelihara	197,783,000	74	96	190,553,350
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan Dinas dan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat tersedia	197,783,000	100	96	190,553,350
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat terlaksana	138,452,611,894	83	81	111,693,655,462
1.02.02.2.01	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Fasilitas kesehatan UKP dan UKM tersedia	25,494,051,982	73	87	22,211,759,281
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Puskesmas terbangun	7,000,000,000	60	80	5,626,636,500
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Rumah Dinas Tenaga Kesehatan terbangun	2,100,000,000	80	97	2,041,761,260
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Fasilitas Kesehatan dikembangkan	336,127,250	50	100	336,127,250
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Puskesmas direhab dan dipelihara	200,000,000	75	0	0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA TAHUN 2021		REALISASI KINERJA TH 2021	
			Rp	%	%	Rp
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sarana Fasilitas Kesehatan tersedia	5,656,401,500	75	83	4,707,847,840
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan tersedia	7,083,295,837	75	95	6,725,252,927
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Alat Kesehatan di Kalibrasi	142,736,000	75	66	94,664,000
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Obat dan Vaksin tersedia	2,975,491,395	85	90	2,679,469,504
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelayanan kesehatan UKM dan UKP terlaksana	112,550,964,923	90	79	89,176,688,931
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin terlaksana	2,738,312,000	100	56	1,539,833,020
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir terlaksana	2,030,000	100	99	2,000,000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan Balita terlaksana	3,700,000	100	97	3,600,000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut terlaksana	39,100,000	100	71	27,835,000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi terlaksana	0	100	0	0
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus terlaksana	0	100	0	0
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat terlaksana	0	100	0	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB terlaksana	0	100	0	0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA TAHUN 2021		REALISASI KINERJA TH 2021	
			Rp	%	%	Rp
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana terlaksana	42,750,000	100	15	6,220,000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat terlaksana	847,563,000	100	47	398,531,725
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga terlaksana	18,100,000	50	59	10,705,000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pelayanan Kesehatan Lingkungan terlaksana	480,262,300	55	55	266,255,440
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pelayanan Promosi Kesehatan terlaksana	158,000,000	70	46	72,430,000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Surveilans Kesehatan terlaksana	0	100	0	2,480,000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA terlaksana	0	100	0	0
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Pelayanan Kesehatan Khusus terlaksana	207,423,650	100	44	91,735,000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular terlaksana	1,944,606,620	100	46	902,888,158
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jaminan Kesehatan Masyarakat terlaksana	68,093,479,363	95	92	62,980,406,016
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Pelayanan Rumah Sakit terlaksana	0	75	0	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pelayanan Puskesmas terlaksana	19,562,572,842	75	81	15,801,926,770
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya terlaksana	16,106,290,418	75	42	6,721,097,302

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA TAHUN 2021		REALISASI KINERJA TH 2021	
			Rp	%	%	Rp
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota terlaksana	957,950,000	90	35	333,003,000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah terlaksana	1,348,824,730	100	1	15,742,500
1.02.02.2.03	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi tersedia	267,021,589	82	88	233,737,250
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Sistem informasi kesehatan tersedia	190,380,000	81	86	163,725,000
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Alat perangkat sistem informasi kesehatan tersedia	76,641,589	65	91	70,012,250
1.02.02.2.04	PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Izin Rumah sakit terbit	140,573,400	86	51	71,470,000
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terlaksana	53,015,400	100	35	18,395,000
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan terlaksana	87,558,000	70	61	53,075,000
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan terlaksana	0	100	0	0
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kapasitas Sumber Daya Manusia Meningkat	22,447,638,905	80	100	22,430,560,798
1.02.03.2.02	PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan kebutuhan SDM terlaksana	22,447,638,905	88	100	22,430,560,798
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan tersedia	22,379,438,905	95	100	22,363,165,798
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan terlaksana	68,200,000	95	99	67,395,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA TAHUN 2021		REALISASI KINERJA TH 2021	
			Rp	%	%	Rp
1.02.03.2.03	PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kompetensi SDM meningkat	0	60	0	0
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kompetensi SDM meningkat	0	60	0	0
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman terlaksana	566,049,000	75	72	406,502,100
1.02.04.2.01	PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) berizin	534,724,000	80	72	386,903,100
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) mendapat pengawasan	502,774,000	70	71	359,400,100
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) terpenuhi komitmen	31,950,000	100	86	27,503,000
1.02.04.2.03	PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri ah Tangga bersertifikat	31,325,000	80	63	19,599,000
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya terlaksana	31,325,000	70	63	19,599,000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan terlaksana	1,823,887,000	67	39	708,102,000
1.02.05.2.01	ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota meningkat	1,823,887,000	70	39	708,102,000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Posyandu Aktif terbina	1,823,887,000	70	39	708,102,000
	JUMLAH		232,214,313,195			202,313,050,860

Program bidang kesehatan yang dilaksanakan di tahun 2021 sebanyak 5 (lima) Program, 22 (Duapuluh Dua) Kegiatan, 107 (Seratus Tujuh) Subkegiatan. Dari hasil rata-rata kinerja memperoleh nilai 87,1 atau dengan kategori cukup berhasil. Berdasarkan hasil analisis maka kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan APBD adalah :

1. Masih kurangnya tenaga medis khususnya di daerah-daerah sangat sulit, sehingga beberapa Puskesmas kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat belum optimal.
2. Rumah Sakit Pratama hingga saat ini belum tersedia tenaga medis spesialis, sehingga dalam penanganan pasien-pasien khususnya kasus ibu dan anak harus dirujuk ke Faskes Kabupaten yang jaraknya cukup jauh, hal ini akan berdampak pada resiko kematian ibu dan bayi lebih tinggi.
3. Sarana dan Prasarana di Faskes seperti bangunan Puskesmas induk dan Puskesmas pembantu serta sarana transportasi ambulans di beberapa wilayah masih banyak perlu pembenahan agar kualitas pelayanan untuk masyarakat semakin baik.
4. Keterbatasan sumber daya manusia terutama di bidang penatausahaan keuangan dan administrasi. Dalam pelaksanaan pertanggung-jawaban keuangan dilakukan oleh tenaga fungsional kesehatan yang telah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.
5. Dalam pemenuhan target kinerja di masyarakat, terdapat perbedaan yang cukup tinggi target Renstra Kabupaten dan Renstra Kementerian, sehingga realisasi dilapangan meskipun cakupan data sudah maksimal namun tidak dapat mencapai target yang ditetapkan.

## **B. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja OPD tahun 2021 maka kinerja OPD Dinas Kesehatan dapat digambarkan sebagai berikut :

### **1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2021**

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan merupakan indikator kinerja yang wajib yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan



mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara.

Adapun Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas wajib dilaksanakan sebanyak 12 (duabelas) indikator yang terdiri dari :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen). Pencapaian target-target SPM lebih diarahkan kepada kinerja Pemerintah Daerah, menjadi penilaian kinerja daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada warga negara. SPM sebagai bahan Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan nasional, pemberian insentif, disinsentif dan sanksi administrasi Kepala Daerah.

Implementasi SPM menjadi sangat strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Implementasi SPM akan memperkuat sisi promotif-preventif sehingga diharapkan akan ber-impact pada penurunan jumlah kasus kuratif yang harus ditanggung oleh JKN

Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 belum mencapai hasil maksimal. Berbagai faktor yang mempengaruhi seperti faktor sumber daya manusia, sarana, prasarana dan data sasaran yang ditetapkan, dan pendanaan. Capaian SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Capaian SPM Bidang Kesehatan  
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021**

NO	URAIAN	SASARAN	CAPAIAN	%
1	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	8,808	7,635	86.7%
2	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	8,152	7,901	96.9%
3	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	8,802	7,530	85.5%
4	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	45,606	29,444	64.6%
5	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	18,914	13,443	71.1%
6	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	284,166	193,709	68.2%
7	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	25,878	15,028	58.1%
8	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	11,539	8,808	76.3%
9	Jumlah penderita DM berusia $\geq 15$ tahun diwilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam waktu satu tahun	3,471	2,597	74.8%
10	Jumlah ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	580	426	73.4%
11	Jumlah orang yang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan dalam kurun waktu satu tahun	4,207	2,545	60.5%
12	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan sesuai standar dalam waktu satu tahun	10,601	6,562	61.9%

## **2. Capaian Kinerja Bidang Dinas Kesehatan**

Pencapaian kinerja bidang-bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021 dijabarkan melalui bidang-bidang yang ada di Dinas Kesehatan yaitu Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Sumber Daya Kesehatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sekretariat yang dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

### **a. Bidang Kesehatan Masyarakat**

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 bahwa Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri tiga seksi yaitu seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat dan seksi Kesehatan Lingkungan/Kesehatan Kerja.

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja. Pencapaian kinerja bidang Kesehatan Masyarakat tahun 2021 yang terdiri atas tiga seksi yaitu seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat dan seksi Kesehatan Lingkungan/Kesehatan Kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat  
Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021		KET
		TARGET	CAPAIAN	
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT				
Menurunnya kematian ibu	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	175	227	Tidak Tercapai
Menurunnya angka kematian bayi	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	11	10,7	Tercapai
Meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	96,9	Tidak Tercapai
Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu nifas	Cakupan pelayanan nifas	82	82,5	Tercapai
Menurunnya balita stunting	Prevalensi Stunting	26	22,82	Tercapai
Meningkatnya Desa stop buang air besar sembarangan	Persentase Desa yang stop buang air besar di sembarang tempat	35	15,73	Belum Tercapai
Meningkatnya Kecamatan menerapkan Germas	Persentase Kecamatan menerapkan Germas	50	58,8	Tercapai

Dari tabel 3.1 dapat dilihat secara umum kinerja tahun 2021 sebanyak 4 indikator kinerja tercapai dan 3 indikator tercapai. Indikator yang belum tercapai yaitu angka kematian ibu, pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan desa dengan stop buang air besar di sembarang tempat. Beberapa permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya adalah faktor adanya pandemic Covid-19, dan budaya perilaku masyarakat yang belum menerapkan PHBS di masyarakat.

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Seksi Kesga dan Gizi Masyarakat  
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021		KET
		TARGET	CAPAIAN	
SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT				
Menurunnya balita stunting	Prevalensi Stunting	26	22,82	Tercapai
Menurunnya angka kematian bayi	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	175	227	Tidak Tercapai
Menurunnya kematian ibu	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	11	10,7	Tercapai
Meningkatnya penanganan komplikasi kebidanan	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	100	Tercapai
Meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	96,0	Tidak Tercapai
Meningkatnya balita gizi buruk yang mendapat perawatan	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	Tercapai
Meningkatnya kunjungan bayi	Cakupan kunjungan bayi	79,3	84,7	Tercapai
Meningkatnya kunjungan ibu hamil yang mendapat pelayanan sesuai standar	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	100	86,7	Tidak Tercapai
Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu nifas	Cakupan pelayanan nifas	82	82,5	Tercapai
Meningkatnya pelayanan neonatus dengan komplikasi	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100	100	Tercapai
Meningkatnya pemberian MPASI usia 6-24 bulan keluarga miskin	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	40	70,8	Tercapai
Meningkatnya penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	70	71,1	Tercapai
Meningkatnya persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100	96,9	Tidak Tercapai
Meningkatnya bayi baru lahir 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	100	85,5	Tidak Tercapai
Meningkatnya balita yang mendapat pelayanan kesehatan	Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	64,6	Tidak Tercapai
Meningkatnya anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan skrining kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100	71,1	Tidak Tercapai
Meningkatnya lansia usia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Persentase orang lanjut usia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	100	58,1	Tidak Tercapai
Meningkatnya bayi usia kurang 6 bulan mendapat ASI eksklusif	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	45	57,8	Tercapai

Capaian indikator kinerja seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai 18 sasaran dan indikator kinerja. Sebanyak 10 indikator tercapai dan delapan indikator belum tercapai. Faktor yang menyebabkan belum tercapainya indikator kinerja ini adalah dampak dari pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 mengakibatkan terbatasnya mobilitas petugas dalam melaksanakan kegiatan di masyarakat secara optimal.

Tabel 3.3  
Capaian Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja  
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021		KET
		TARGET	CAPAIAN	
SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN DAN KESEHATAN KERJA				
Meningkatnya sarana air minum yang awasi/periksa kualitas air minumnya	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	60	55	Belum Tercapai
Meningkatnya tempat pengolahan pangan sesuai standar	Presentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	70	30	Belum Tercapai
Meningkatnya tempat dan fasilitas umum yang dilakukan pengawasan	Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	55	51	Belum Tercapai
Meningkatnya Desa stop buang air besar sembarangan	Persentase Desa yang stop buang air besar di sembarang tempat	35	15	Belum Tercapai
Meningkatnya Kecamatan yang melaksanakan kesehatan kerja	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan kesehatan kerja	35	23	Belum Tercapai
Meningkatnya Kecamatan yang melaksanakan kesehatan olahraga	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan kesehatan olahraga	10	11	Tercapai

Capaian seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja sebanyak enam sasaran dengan enam indikator kinerja. Dari enam indikator hanya satu indikator yang tercapai sedangkan lima indikator lainnya belum tercapai. Faktor yang menyebabkan belum tercapainya indikator kinerja ini adalah dampak dari pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 mengakibatkan terbatasnya mobilitas petugas dalam melaksanakan kegiatan di masyarakat secara optimal.

Tabel 3.4  
Capaian Seksi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat  
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021		KET
		TARGET	CAPAIAN	
PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
Meningkatnya Jumlah Posyandu	Cakupan Posyandu per 1.000 balita	8,12	6,84	Belum Tercapai
Meningkatnya Kecamatan menerapkan Germas	Persentase Kecamatan menerapkan Germas	50	63,64	Tercapai
Meningkatnya desa/kelurahan menjadi desa/kelurahan siaga aktif	Persentase desa/keluarahan siaga aktif	70	70,83	Tercapai
Meningatnya sekolah melaksanakan UKS	Persentase sekolah melaksanakan UKS	46	30,02	Belum Tercapai

Capaian kinerja seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebanyak dua indikator tercapai sedangkan dua indikator lainnya belum tercapai. Faktor yang menyebabkan belum tercapainya indikator kinerja ini adalah dampak dari pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 mengakibatkan terbatasnya mobilitas petugas dalam melaksanakan kegiatan di masyarakat secara optimal.

#### **b. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

Capaian kinerja bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2021 yang terdiri atas tiga seksi yaitu seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, dan seksi Surveilans dan Imunisasi.

Kinerja bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan tahun 2021 sebanyak delapan sasaran dengan delapan indikator kinerja sebanyak satu indikator kinerja yang tercapai sedangkan tujuh indikator kinerja lainnya belum tercapai. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah data sasaran yang belum akurat (masih menggunakan proyeksi dari Pusdatin Kementerian Kesehatan dan kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan mobilitas dan akses ke masyarakat masih terbatas).

Tabel : 3.5  
Capaian Kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten  
Kotawaringin Timur Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021		KET
		TARGET	CAPAIAN	
BIDANG PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT				
Meningkatnya Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	80	61,90	Belum Tercapai
Meningkatnya respon peringatan dini KLB (alert sistem) dilakukan penyelidikan epidemiologi	Persentase Respon peringatan dini KLB (alert sistem) dilakukan penyelidikan epidemiologi	100	100	Tercapai
Meningkatnya jumlah terduga TBC yang mendapat pemeriksaan sesuai standar	Jumlah orang yang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar	100	60,5	Belum Tercapai
Meningkatnya orang berisiko HIV yang mendapatkan pemeriksaan sesuai standar	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan sesuai standar	100	61,9	Belum Tercapai
Meningkatnya usia produktif yang diskriming	Persentase Usia Produktif yang mendapat skrining sesuai standar	100	68,2	Belum Tercapai
Meningkatnya penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan	Persentase penderita hipertensi yangmendapatkan pelayanan sesuai standar	100	76,3	Belum Tercapai
Meningkatnya penderita DM yang mendapatkan pelayanan	Persentase penderita DM yag mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	74,8	Belum Tercapai
Meningkatnya ODGJ yang mendapat pelayanan	Persentase ODGJ yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	73,4	Belum Tercapai

Sedangkan capaian seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan tahun 2021 dengan lima sasaran dan indikator diperoleh hasil, sebanyak satu indikator belum tercapai dan empat indikator lainnya tercapai. Kecepatan dan ketepatan tenaga surveilans di masing-masing UPTD merupakan faktor penting dalam tercapainya indikator-indikator pada seksi Surveilans dan Imunisasi

Tabel : 3.6  
Capaian Kinerja Seksi Surveilans dan Imunisasi  
Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021		KET
		TARGET	CAPAIAN	
SURVEILANS DAN IMUNISASI				
Meningkatnya Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	80	61,90	Tecapai
Meningkatnya penemuan Non Polio AFP	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	100	100	Tecapai
Meningkatnya Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	Tecapai
Meningkatnya bayi usia 0-11 bln yang mendapat imunisasi lengkap	Persentase bayi usia 0-11 bln yg mendapat imunisasi dasar lengkap	76,4	86,00	Tecapai
Meningkatnya respon peringatan dini KLB (alert sistem) dilakukan penyelidikan epidemiologi	Persentase Respon peringatan dini KLB (alert sistem) dilakukan penyelidikan epidemiologi	100	100	Tecapai

Tabel : 3.7  
Capaian Kinerja Seksi P2P Dinas Kesehatan  
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021		KET
		TARGET	CAPAIAN	
SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PEMNYAKIT TIDAK MENULAR DAN EKSEHATAN JIWA				
Meningkatnya Kecamatan yang melakukan deteksi dini penyakit kanker	Jumlah Kecamatan yang melakukan deteksi dini penyakit kanker di populasi usia 30-50 tahun	80	64,7	Belum Tercapai
Meningkatnya usia produktif yang diskriming	Persentase Usia Produktif yang mendapat skrining sesuai standar	100	68,2	Belum Tercapai
Meningkatnya penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan	Persentase penderita hipertensi yangmendapatkan pelayanan sesuai standar	100	76,3	Belum Tercapai
Meningkatnya penderita DM yang mendapatkan pelayanan	Persentase penderita DM yag mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	74,8	Belum Tercapai
Meningkatnya ODGJ yang mendapat pelayanan	Persentase ODGJ yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	73,4	Belum Tercapai
Meningkatnya penanganan kasus penyakit tidak menular lainnya	Kasus penyakit tidak menular lainnya tertangani	100	100	Tercapai



Capaian kinerja seksi Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dari enam sasaran dan indikator sebanyak satu indikator yang tercapai dan lima indikator belum tercapai. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah data sasaran yang belum akurat (masih menggunakan proyeksi dari Pusdatin Kementerian Kesehatan dan kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan mobilitas dan akses ke masyarakat masih terbatas.

### c. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Capaian kinerja Dinas Kesehatan bidang Sumber Daya Kesehatan tahun 2021 yang terdiri atas tiga seksi yaitu seksi Kefarmasian, seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan, dan seksi Sumber Daya Manusia. Capaian kinerja bidang Sumber Daya Kesehatan dapat dilihat pada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel : 3.8  
Capaian Kinerja Bidang Sumber Daya Kesehatan  
Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021		KET
		TARGET	CAPAIAN	
BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN				
Meningkatnya Puskesmas yang mempunyai kelompok rumpun jabatan	Persentase Puskesmas dengan jenis kelompok rumpun jabatan sesuai standar	47	23,8	Belum Tercapai
Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan kefarmasian	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan kefarmasian sesuai standar	50	71,4	Tercapai
Meningkatnya sentra makanan dan minuman yang laik sehat	Persentase sentra makanan dan minuman yang laik sehat	80	63,2	Belum Tercapai
Meningkatnya alat kesehatan dan PKRT di Puskesmas yang memenuhi syarat	Presentase alat kesehatan dan PKRT di Puskesmas yang memenuhi syarat	70	57,1	Belum Tercapai

Capaian terhadap sasaran dan indikator kinerja Bidang Sumber Daya Kesehatan tahun 2021 sebanyak empat indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut : sebanyak tiga indikator kinerja belum tercapai dan satu indikator kinerja tercapai. Indikator yang tercapai yaitu persentase fasilitas Kesehatan yang melaksanakan kefarmasian. Faktor yang menyebabkan beberapa yang belum tercapainya indikator Bidang Sumber Daya Kesehatan adalah kondisi pandemic Covid-19 yang menyebabkan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan

masyarakat langsung banyak mengalami kendala. Selain itu faktor refocusing anggaran Covid-19 yang mengakibatkan kegiatan banyak yang tertunda. Sedangkan capaian kinerja Seksi bidang Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel : 3.9

Capaian Kinerja Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021		KET
		TARGET	CAPAIAN	
SEKSI ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA				
Meningkatnya Puskesmas dengan kecukupan alat kesehatan dan PKRT	Persentase Puskesmas alat kesehatan dan PKRT yang cukup	70	56,1	Belum Tercapai
Meningkatnya alat kesehatan dan PKRT di Puskesmas yang memenuhi syarat	Presentase alat kesehatan dan PKRT di Puskesmas yang memenuhi syarat	70	76,2	Belum Tercapai

Capaian indikator kinerja Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga terdiri dari dua indikator kinerja dan semua belum tercapai. Tidak tercapainya indikator ini adalah keterbatasan anggaran yang tersedia akibat refocusing dampak covid-19. Alat Kesehatan di Puskesmas sebagian belum tersedia.

Tabel : 3.10

Capaian Kinerja Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021		KET
		TARGET	CAPAIAN	
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
Menurunnya Puskesmas tanpa dokter	Persentase Puskesmas tanpa dokter	10	4,8	Tercapai
Meningkatnya Puskesmas yang mempunyai kelompok rumpun jabatan	Persentase Puskesmas dengan jenis kelompok rumpun jabatan sesuai standar	47	23,8	Belum Tercapai
Meningkatnya tenaga kesehatan kesehatan yang teregistrasi	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	95	82	Belum Tercapai
Meningkatnya sistem informasi tenaga kesehatan terupdate secara berkala	Persentase sistem informasi tenaga kesehatan yang terupdate secara berkala	80	85	Tercapai
Meningkatnya SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	60	40	Belum Tercapai

Capaian kinerja Seksi Sumber Daya Kesehatan manusia lima sasaran dengan lima indikator kinerja. Dari lima indikator tersebut dua tercapai dan yang tiga belum tercapai.

Tabel : 3.11  
Capaian Kinerja Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan  
Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021		KET
		TARGET	CAPAIAN	
KEFARMASIAN				
Meningkatnya Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial	85	89,8	Tercapai
Meningkatnya Puskesmas dengan ketersediaan vaksin IDL	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan vaksin IDL	85	90,5	Tercapai
Meningkatnya rumah sakit dengan menggunakan obat sesuai FORNAS	Persentase rumah sakit dengan menggunakan obat sesuai FORNAS	65	66,7	Tercapai
Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan kefarmasian	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan kefarmasian sesuai standar	50	81,0	Tercapai
Meningkatnya sentra makanan dan minuman yang laik sehat	Persentase sentra makanan dan minuman yang laik sehat	80	62,1	Belum Tercapai

#### 4. Bidang Pelayanan Kesehatan

Kinerja bidang Pelayanan Kesehatan tahun 2021 yang terdiri atas tiga seksi yaitu seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan seksi Akreditasi dan Mutu Kesehatan mempunyai satu sasaran dengan tiga indikator kinerja. Indikator kinerja bidang Pelayanan Kesehatan dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut :

Tabel : 3.12  
Capaian Kinerja Bidang Pelayanan Kesehatan  
Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021		KET
		TARGET	CAPAIAN	
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN				
Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan mutu pelayanan kesehatan	Persentase fasyankes melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan	70	85,7	Tercapai
Menurunnya rujukan nonspesialistik di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama	Persentase FKTP dengan rasio rujukan non spesialisik kurang dari sama dengan 2%	40	23,8	Tercapai
Jumlah rumah sakit rujukan dengan pelayanan sesuai standar	Persentase RS rujukan dengan pelayanan standar	50	33,3	Tercapai

Indikator kinerja bidang Pelayanan Kesehatan Dasar Dinas Kesehatan sebanyak tiga sasaran dengan tiga indikator dengan hasil semua tercapai. Kondisi pelayanan kesehatan di tengah pandemi Covid-19 perlu penanganan khusus dalam pemberian pelayanan di masyarakat. Salah satu yang dilakukan adalah sistem jemput bola. Petugas kesehatan tetap melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan dengan mendatangi masyarakat khususnya daerah yang memerlukan pelayanan Kesehatan. Sedangkan capaian sasaran dan indikator seksi pada bidang Pelayanan Kesehatan tahun 2021 dapat dilihat pada table 3.13 sebagai berikut :

Tabel : 3.13  
Capaian Kinerja Seksi Akreditasi dan Mutu  
Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021		KET
		TARGET	CAPAIAN	
AKREDITASI DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN				
Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang terakreditasi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang terakreditasi	90,5	90,5	Tercapai
Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang terakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi	30	33,3	Tercapai
Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan mutu pelayanan kesehatan	Persentase fasyankes melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan	70	85,7	Tercapai

Capaian indikator kinerja seksi Akreditasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan tahun 2021 sebanyak tiga sasaran dengan tiga indikator semua tercapai. Puskesmas yang terakreditasi sampai dengan tahun 2021 berjumlah 19 dari 21 Puskesmas. Puskesmas Tumbang Penyahuan dan Tualan Hulu merupakan Puskesmas yang belum melaksanakan akreditasi. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemic Covid-19, Puskesmas tidak bisa melaksanakan penilaian akreditasi.

Capaian kinerja seksi Pelayanan Kesehatan Dasar terdiri dari sepuluh sasaran dengan sepuluh indikator kinerja dengan hasil sebanyak tujuh indikator tercapai dan tiga indikator lainnya belum tercapai. Faktor yang belum tercapainya indikator kinerja pada seksi Pelayanan Kesehatan Dasar adalah kondisi Pandemi Covid-19 dan anggaran yang terbatas.

Tabel : 3.14  
Capaian Kinerja Seksi Pelayanan Kesehatan Primer  
Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021		KET
		TARGET	CAPAIAN	
PELAYANAN KESEHATAN PRIMER				
Meningkatnya Rasio Puskesmas	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	19795	19823	Tercapai
Meningkatnya Rasio Pustu	Rasio Pustu per satuan penduduk	2867	2871	Tercapai
Meningkatnya pelayanan kesehatan bergerak di daerah terpencil dan sangat terpencil	Jumlah pelayanan kesehatan bergerak yang dilakukan di daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai standar	5	2	Belum Tercapai
Meningkatnya Kecamatan yang melaksanakan PIS-PK	Persentase Kecamatan yang telah melaksanakan PIS-PK dengan intervensi keluarga	90	100	Tercapai
Menurunnya rujukan nonspesialistik di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama	Persentase FKTP dengan rasio rujukan non spesialisik kurang dari sama dengan 2,5%	40	23,8	Tercapai
Meningkatnya Puskesmas dengan pelayanan gigi dan mulut	Persentase Puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang optimal	50	47,6	Belum Tercapai
Meningkatnya pembinaan praktik mandiri dokter dan dokter gigi di Kecamatan	Persentase pembinaan praktik mandiri dokter atau dokter gigi di Kecamatan sesuai standar	50	38,1	Belum Tercapai
Meningkatnya pembinaan dan bimbingan teknis terhadap klinik di wilayah kerja Kecamatan	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan dan bimtek terhadap klinik di wilayah kerjanya agar sesuai dengan standar	35	48,4	Tercapai
Meningkatnya pelayanan kesehatan haji	Persentase tenaga haji yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	Tercapai
Meningkatnya UTD Kabupaten yang mendapat pembinaan	Jumlah UTD yang mendapatkan pembinaan sesuai standar pelayanan transfusi darah	1	1	Tercapai

Kinerja seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dari tujuh sasaran dengan tujuh indikator kinerja. Dari tujuh indikator kinerja tiga indikator tercapai dan empat indikator tidak tercapai. Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya indikator kinerja rujukan adalah sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yg belum terpenuhi.

Tabel : 3.15  
Capaian Kinerja Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan  
Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021		KET
		TARGET	CAPAIAN	
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN				
Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	Tercapai
Meningkatnya pelayanan gawat darurat level 1 oleh sarana kesehatan (RS)	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	Tercapai
Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan telemedicine	Persentase fasyankes yang diampu dalam melaksanakan telemedicine	14,3	0	Belum Tercapai
Tersedianya layanan PSC 119 di Kabupaten	Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan Public Safety Center (PSC) 119	1	1	Tercapai
Persentase Rasio TT di rumah sakit dengan jumlah penduduk yang memenuhi rasio TT 1:1.000 jumlah penduduk	Rasio TT rumah sakit kabupaten	1383	1104	Belum Tercapai
Jumlah rumah sakit rujukan dengan pelayanan sesuai standar	Persentase RS rujukan dengan pelayanan standar	50	33	Belum Tercapai
Jumlah fasilitas kesehatan rujukan swasta dilakukan pembinaan sesuai standar	Persentase faskes rujukan swasta dengan pembinaan sesuai standar	55	50	Belum Tercapai

## 5. Bidang Sekretariat

Sekretariat Dinas Kesehatan terdiri tiga sub bagian yaitu Perencanaan Pelaporan, Umum Kepegawaian, dan Keuangan. Capaian kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut :

Tabel : 3.16 Capaian Kinerja Sekretariat  
Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021		KET
		TARGET	CAPAIAN	
SEKRETARIAT				
Meningkatnya kinerja laporan keuangan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	100	100	Tercapai
Meningkatnya pengelolaan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan	Persentase SIK Puskesmas yang terintegrasi	90	85,7	Belum Tercapai
Meningkatnya kinerja perencanaan dan penganggaran program kesehatan	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100	100	Tercapai
Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase SKP aparatur	100	100	Tercapai

Capaian indikator Sekretariat Dinas Kesehatan terdiri dari empat sasaran dengan empat indikator. Dari empat indikator kinerja pendukung, sebanyak tiga indikator tercapai dan satu indikator belum tercapai. Sedangkan capaian indikator kinerja sub bagian kesekretariatan terdiri pada tabel sebagai berikut :

Tabel : 3.17 Capaian Kinerja Sekretariat  
Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021		KET
		TARGET	CAPAIAN	
KEUANGAN				
Meningkatnya kinerja laporan keuangan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	100	100	Tercapai
PERENCANAAN DAN PELAPORAN				
Meningkatnya pengelolaan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan	Persentase SIK Puskesmas yang terintegrasi	90	85,7	Belum Tercapai
Meningkatnya kinerja perencanaan dan penganggaran program kesehatan	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100	100	Tercapai
UMUM DAN KEPEGAWAIAN				
Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase SKP aparatur	100	100	Tercapai
Meningkatnya kepuasan pengguna layanan ketatausahaan	Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan ketatausahaan	80	82,3	Tercapai
Tersedianya penunjang urusan daerah tersedia	Administrasi keuangan terlaksana	100	87,1	Belum Tercapai
	Administrasi umum daerah terlaksana	78,3	80,2	Tercapai
	Administrasi kepegawaian terlaksana	83,5	80,0	Belum Tercapai
	BMD penunjang terpelihara	72,5	65,4	Belum Tercapai
	Jasa penunjang tersedia	83,8	90,0	Tercapai

## 6. UPTD Puskesmas

Kotawaringin Timur di tahun 2021 mempunyai sebanyak 21 Puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan. Beberapa Kecamatan ada yang mempunyai lebih dari 1 Puskesmas yaitu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Baamang dan Parenggean. Sedangkan yang lainnya 1 kecamatan 1 Puskesmas. Secara rasio sudah memenuhi dari standar yang ditetapkan Nasional.

Sasaran dan indikator kinerja UPTD Puskesmas di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021 merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal. Sasaran dan indikator kinerja UPTD Puskesmas dilihat pada tabel 3.18 berikut :

Tabel : 3.18 Capaian Kinerja UPTD Puskesmas  
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021		KET
		TARGET	CAPAIAN	
Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	100	86,7%	Belum Tercapai
Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	100	96,9%	Belum Tercapai
Meningkatnya pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	100	85,5%	Belum Tercapai
Meningkatnya pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	64,6%	Belum Tercapai
Meningkatnya screening kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	100	71,1%	Belum Tercapai
Meningkatnya screening penduduk usia 15 sd 59 tahun sesuai standar	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	68,2%	Belum Tercapai
Meningkatnya screening kesehatan penduduk usia 60 tahun ke atas sesuai standar	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	100	58,1%	Belum Tercapai
Meningkatnya pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	76,3%	Belum Tercapai
Meningkatnya penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM berusia ≥ 15 tahun di wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam waktu satu tahun	100	74,8%	Belum Tercapai
Meningkatnya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sesuai standar	Jumlah ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	73,4%	Belum Tercapai
Meningkatnya pelayanan kesehatan orang dengan terduga TB sesuai standar	Jumlah orang yang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan dalam kurun waktu satu tahun	100	60,5%	Belum Tercapai
Meningkatnya pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan sesuai standar dalam waktu satu tahun	100	61,9%	Belum Tercapai

Capaian indikator kinerja Puskesmas tahun 2021 yang terdiri dari duabelas indikator utama SPM belum tercapai. Tidak adanya target yang tercapai disebabkan sasaran tahun 2021 masih proyeksi yang bersumber Pusat Data dan Informasi



Kementerian Kesehatan karena data yang berbasis pendataan keluarga sehat (PIS-PK) sampai dengan tahun 2021 belum coverage (100%). Faktor yang menyebabkan belum tercapainya indikator kinerja ini adalah dampak dari pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 mengakibatkan terbatasnya mobilitas petugas dalam melaksanakan kegiatan di masyarakat secara optimal.

## 7. UPTD Gudang Farmasi

Kinerja UPTD Gudang Farmasi Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021 yang terdiri satu indikator sasaran dan dua indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.19

Capaian Kinerja UPTD Gudang Farmasi  
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021		KET
		TARGET	CAPAIAN	
UPT GUDANG FARMASI				
Tersedianya obat dan BMHP selama 12 bulan dan buffer stok selama 6 bulan	Ketersediaan obat Kabupaten	85	89,76	Tercapai
	Ketersediaan BMHP Kabupaten	85	75.23	Belum Tercapai

Capaian indikator kinerja pada UPTD Gudang Farmasi tahun 2021 yang terdiri satu sasaran dengan dua indikator kinerja pendukung. Dari dua indikator tersebut satu indikator tercapai dan satu indikator lainnya belum tercapai. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya adalah anggaran yang tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan BMHP.

## 8. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)

Kinerja UPTD Labkesda Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021 yang terdiri dari dua sasaran dengan dua indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 3.20 berikut :

Tabel 3.20 Capaian Kinerja UPTD Labkesda  
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021		KET
		TARGET	CAPAIAN	
LABKESDA				
Meningkatnya pelayanan laboratorium klinik	Sampel laboratorium klinik ditangani	100	100	Tercapai
Meningkatnya pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat	Sampel laboratorium kesehatan masyarakat ditangani	100	100	Tercapai

Capaian sasaran dan indikator kinerja Laboratorium Kesehatan Daerah Kotawaringin Timur tahun 2021 dari dua sasaran dan dengan dua indikator kinerja semua tercapai. Semua kunjungan Labkesda tertangani pemeriksaan klinik dan Kesehatan masyarakat.

## 9. Rumah Sakit Pratama

Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 3 yang terdiri dari Rumah Sakit dr. Murjani di ibu kota Kabupaten, Rumas Sakit Pratama Samuda di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan Rumah Sakit Pratama Parenggean di Kecamatan Parenggean.

Capaian indikator kinerja Rumah Sakit dr. Murjani, Rumah Sakit Pratama Samuda, dan Rumah Sakit Pratama Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 3.21  
Capaian Kinerja Rumah Sakit  
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021		KET
		TARGET	CAPAIAN	
RUMAH SAKIT				
Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan rujukan	Average Length of Stay (ALOS)	6-9 hari	6,35	Tercapai
	Bed Occupacy Rate (BOR)	60-85%	63,13	Tercapai
	Net Death Rate (NDR)	<25 per 1.000 pasien keluar RS	0,1625	Tercapai

Capaian indikator kinerja Rumah Sakit dapat diuraikan dengan hasil yaitu sebanyak satu sasaran dengan tiga indikator kinerja. Dari tiga indikator semua tercapai.

## C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD

### 1. Tantangan Pembangunan Kesehatan Di Kabupaten Kotawaringin Timur

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pembangunan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur dimulai dari kondisi alamnya, jarak tempuh, sarana transportasi, biaya hidup sampai pada masalah-masalah sosial lainnya. Biaya transportasi dari ibukota kabupaten ke kecamatan dan dari kecamatan ke desa. Sarana listrik umumnya hanya di ibukota

kecamatan saja tidak sampai ke desa, bahkan masih ada ibukota kecamatan belum mempunyai listrik. Kebutuhan listrik di daerah tersebut dipenuhi dengan menggunakan mesin genset yang dimiliki warga setempat. Beberapa kecamatanpun belum menikmati sarana komunikasi.

Kondisi geografis sebagian daerah yang cukup sulit ditambah dengan sarana dan prasarana yang belum memadai terutama di daerah pedalaman, menyebabkan banyak tenaga kesehatan yang enggan ditempatkan di daerah tersebut. Akibatnya terjadi maldistribusi tenaga kesehatan. Daerah perkotaan dan daerah yang cukup ramai terjadi penumpukan tenaga, sedangkan daerah sulit dan terpencil keadaan terjadi sebaliknya.

Puskesmas-Puskesmas induk dengan jumlah penduduk yang cukup banyak dan tersedia fasilitas yang memadai seperti Puskesmas Samuda, Puskesmas Parenggean, Puskesmas di perkotaan dan sekitar kota mempunyai tenaga kesehatan rata-rata lebih 30 orang, sementara Puskesmas terpencil seperti Teluk Sampit, Bukit Santuai, Tumbang Kalang dan Tualan Hulu dengan jumlah desa yang besar dan wilayah yang luas, jumlah tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia tersebut Pemerintah Daerah menyediakan Tenaga Kontrak Daerah.

## **2. Isu Strategis Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur**

Isu strategis pembangunan bidang Kesehatan yang harus ditangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2022 yaitu :

### **a. Peningkatan Kesehatan Ibu Anak dan Reproduksi**

Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Kotawaringin Timur masih cukup tinggi meskipun masih dibawah target standar nasional. Kematian ibu dan bayi masih ada ditemui setiap tahunnya di Kabupaten Kotawaringin Timur. Target angka kematian ibu 175 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021 menjadi 150 per 100.000 kelahiran hidup menjadi salah satu program prioritas yang harus ditangani secara terpadu.

### **b. Percepatan Penurunan Stunting**

Stunting masih menjadi masalah yang dihadapi pemerintah. Penurunan stunting merupakan prioritas Pemerintah karena terkait dengan kualitas sumber daya

manusia yang akan datang. Target penurunan stunting 26% pada tahun 2021 menjadi 20% pada tahun 2026 menjadi salah satu program prioritas yang harus ditangani secara terpadu.

- c. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan masalah gizi ganda

Salah satu masalah kesehatan yang memprihatinkan saat ini adalah masalah gizi ganda, yaitu keadaan dimana terdapat masalah gizi lebih yang belum terselesaikan telah muncul masalah baru yaitu gizi kurang dengan berbagai macam penyakit yang ditimbulkan. Target Kabupaten Kotawaringin Timur adalah persentase kasus gizi buruk 2,8% pada tahun 2021 dan menurun menjadi 2,0 di tahun 2026.

- d. Peningkatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kondisi ancaman penyakit pada saat ini semakin kompleks, Penyakit tidak menular naik, penyakit menular masih tinggi Peningkatan ini sejalan peningkatan faktor resiko seperti hipertensi, glukosa darah, dan kegemukan, terutama karena pengaruh pola makan, kurang aktivitas fisik, dan merokok. Target penanganan penyakit menular dan tidak menular sesuai SPM bidang Kesehatan harus terlayani sebesar 100% tahun 2021-2026.

- e. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Permasalahan yang dihadapi adalah ketidakpedulian masyarakat dan individu tentang upaya menjaga kesehatan. Kesehatan hanya dibutuhkan ketika sakit. Perilaku Hidup Bersih dan sehat masih belum menjadi budaya. Kebiasaan merokok dan nafza merupakan hambatan yang harus dituntaskan. Target Kabupaten penerapan Germas sebesar 50% di tahun 2021 dan meningkat menjadi sebesar 100% di tahun 2026.

- f. Penguatan Sistem Kesehatan

Penguatan sistem kesehatan merupakan bagian penting agar tersedianya layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat. Untuk mencapai sistem kesehatan yang baik, penguatan sistem merupakan strategi yang digunakan untuk mengakomodasikan aspek supply, demand, kualitas, dan lingkungan yang mendukung untuk tercapainya status kesehatan yang baik. Dalam penguatan sistem diperlukan perhatian yang lebih serius pada level fasilitasi dan translasi

kebijakan dan strategi yaitu aspek akses dan kualitas pelayanan. Prioritas tersebut didasari pada konteks kondisi lokal berdasarkan harapan dan situasi nyata yang diperoleh oleh pemerintah dan stakeholder. Komponen Sistem Kesehatan meliputi Pelayanan kesehatan, Komponen Sistem Kesehatan, Kepemimpinan dan tata kelola, Sistem pembiayaan, Monitoring dan evaluasi sistem informasi kesehatan..

#### D. Review Rancangan Akhir RKPD

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2023 menjembatani fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026, SDG's dan SPM Kesehatan. Penyusunan RKPD tahun 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/0378 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran yang merupakan tahun kedua dalam penggunaan kebijakan ini.

Penyusunan Secara garis besar program dan kegiatan sama dengan tahun sebelumnya dan terdapat penambahan sub kegiatan sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat terutama dalam penanganan pandemi Covid 19.

Tabel 3.32 Rekapitulasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2023

PROGRAM DAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH	PENANGGUNG JAWAB
01.00 DINAS KESEHATAN			
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	71.131.620.527	
1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	1.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	73.550.000	
	1.02.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	45.000.000	
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.250.000	
	1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.425.000	
	1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.250.000	
	1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.250.000	
	1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.050.000	
	1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000	
	1.02.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	45.000.000	
	1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	575.000.000	

PROGRAM DAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH	PENANGGUNG JAWAB
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	1.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	525.000.000	
	1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	65.050.000	
	1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180.000.000	
	1.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.675.000	
	1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	262.500.000	
	1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.500.000	
	1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.947.400.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	
	1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.000.000	
	1.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	-	
	1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	145.000.000	
	1.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	

PROGRAM DAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH	PENANGGUNG JAWAB
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		
	1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
	1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas	-	
	1.02.02.2.01.04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	-	
	1.02.02.2.01.07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	375.000.000	
	1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	3.100.000.000	
	1.02.02.2.01.11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	-	
	1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	
	1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	
	1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	87.500.000	
	1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	670.000.000	
	1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000	

PROGRAM DAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH	PENANGGUNG JAWAB
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	95.000.000	
	1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	105.000.000	
	1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	75.000.000	
	1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	82.250.000	
	1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	75.300.000	
	1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	78.750.000	
	1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	60.000.000	
	1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	60.000.000	
	1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	52.500.000	
	1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	78.750.000	
	1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	278.750.000	
	1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	
	1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	30.000.000	
	1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	95.000.000	
	1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	50.050.000	

PROGRAM DAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH	PENANGGUNG JAWAB
	1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	235.000.000	
	1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	
	1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	-	
	1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	95.000.000	
	1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	337.500.000	
	1.02.02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	-	
	1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	852.500.000	
	1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	42.216.283.200	
	1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5.580.000.000	
	1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	24.041.335.699	
	1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.793.500.000	
	1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-	
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
	1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	-	
	1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	235.550.000	
	1.02.02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	100.000.000	

PROGRAM DAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH	PENANGGUNG JAWAB
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan			
	1.02.02.2.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	145.000.000	
	1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	150.000.000	
	1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	105.000.000	
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			
	1.02.03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	48.750.000	
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia			
	1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	23.074.308.080	
	1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	65.000.000	
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber			
	1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	185.000.000	
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,			
	1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	85.000.000	

PROGRAM DAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH	PENANGGUNG JAWAB
1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat			
	1.02.04.2.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	75.000.000	
1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan			
	1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	63.000.000	
1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan			
	1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta			
	1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	75.000.000	
1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	170.000.000	

## E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat telah dirangkum dari hasil Musrenbang tahun 2023. Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui musrenbang kecamatan antara lain rehabilitasi Puskesmas Pembantu dan Puskesmas, penyuluhan kesehatan, dan kegiatan lainnya yang



merupakan kegiatan rutin dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui kegiatan pengelolaan upaya kesehatan masyarakat yang ada di Puskesmas. Untuk teknis pelaksanaan pada tahun 2023 diperlukan adanya koordinasi yang intensif antara tokoh masyarakat dengan petugas kesehatan di Puskesmas serta melibatkan lintas sektor terkait.

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh DPRD melalui Pokok Pikiran DPRD berupa pembangunan dan rehabilitasi Puskesmas Pembantu, pengadaan meubeler dan peralatan kesehatan.

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Tahun 2021 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, RPJMD (2021-2026) dan juga Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif. Bonus Demografi diharapkan dapat memperoleh sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. Fokus masalah kesehatan yang diagendakan sesuai dengan Rapat Kerja Nasional tahun 2020 yaitu isu Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB), pengendalian Stunting, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Germas, dan Tata Kelola Sistem Kesehatan.

Selaras dengan RPJMN tahun 2020-2024, isu strategis yang harus ditangani oleh Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2016-2021 yaitu :

1. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
2. Peningkatan Upaya Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular;
3. Penguatan Manajemen, Regulasi dan Sistem Informasi Kesehatan
4. Peningkatan ketersediaan, penyebaran, dan mutu SDM kesehatan;
5. Peningkatan aksesibilitas serta mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan;
6. Peningkatan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat

#### **A. Tujuan**

Tujuan Rencana Kerja OPD adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya rumusan program strategis dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikasi program APBD Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun anggaran 2023 mendatang;
2. Tersedianya pedoman umum untuk menetapkan APBD Tahun 2023, berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJPD dan RPJMD, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang berkembang dan disampaikan melalui lembaga eksekutif dan lembaga legislatif;

3. Tersedianya tolok ukur untuk mengevaluasi penilaian Kinerja Pemerintah Daerah;
4. Sebagai salah satu upaya untuk membangun komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD pada tahun 2023;
5. Mendorong partisipasi masyarakat melalui kepastian kebijakan dalam pembangunan jangka pendek;
6. Sebagai pedoman dan arah dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023;
7. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2023;
8. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan;
9. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;

## **B. Sasaran**

Dalam rangka mencapai 5 (lima) strategi Kabupaten Kotawaringin Timur ditetapkan delapan sasaran strategis :

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
6. Terjaminnya pembiayaan Kesehatan
7. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

## **C. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**

KODE	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
x.xx.01..	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Kabupaten/ Kota
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- X.XX.01.2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- X.XX.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- X.XX.01.2.05.03 Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
- X.XX.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- X.XX.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Kepegawaian
- X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- X.XX.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- X.XX.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material
- X.XX.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu
- X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- X.XX.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- X.XX.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
- X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya
- X.XX.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- X.XX.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah
1.02.02..	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Gedung Fasilitas Kesehatan
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
1.02.02.2.01.10	Rehab dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas

	Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
1.02.02.2.02.11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis terlaksana
1.02.02.2.02.12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV terlaksana
1.02.02.2.02.13	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) terlaksana

- 1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
- 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- 1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- 1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
- 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- 1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
- 1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
- 1.02.02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
- 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
- 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
- 1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- 1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KIPI dan Pemberian Obat Massal)
- 1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
- 1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
- 1.02.02.2.03. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- 1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
- 1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- 1.02.02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
- 1.02.02.2.04. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
1.02.03..	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02.03.2.01.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
1.02.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02.03.2.03.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
1.02.04..	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
1.02.04.2.01.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha



- Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- 1.02.04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- 1.02.04.2.01.02 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- 1.02.04.2.02. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
- 1.02.04.2.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
- 1.02.04.2.02.02 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
- 1.02.04.2.03. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- 1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- 1.02.04.2.04. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- 1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan(TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum

- 1.02.05.. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- 1.02.05.2.01. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 1.02.05.2.02. Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Kabupaten/ Kota
- 1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
- 1.02.05.2.03. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **A. Rencana Kerja**

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan). Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program.

Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikasi rencana program prioritas Dinas Kesehatan berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah pemerintah kota maupun untuk pemenuhan layanan Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan Program dan Kegiatan tahun 2023 disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

#### **B. Pendanaan Bidang Kesehatan**

Jumlah anggaran dibandingkan dengan RKPD dimasing-masing program & kegiatan telah menyesuaikan kebutuhan yang direncanakan. Secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan	149.366.261.807,-
2. Rumah Sakit Daerah Parenggean	3.580.000.000,-
3. Rumah Sakit Daerah Samuda	2.000.000.000,-
4. Puskesmas Ujung Pandaran	643.056.000,-
5. Puskesmas Bapinang	1.300.992.000,-
6. Puskesmas Samuda	1.450.573.208,-
7. Puskesmas Bagendang	1.138.132.200,-
8. Puskesmas Ketapang-I	2.077.382.604,-
9. Puskesmas Ketapang-II	2.113.145.000,-
10. Puskesmas Pasir Putih	592.499.600,-
11. Puskesmas Baamang-I	1.588.649.200,-
12. Puskesmas Baamang-II	1.641.894.400,-
13. Puskesmas Mentaya Seberang	841.644.000,-

14. Puskesmas Kota Besi	1.092.885.000,-
15. Puskesmas Sebaby	1.679.500.000,-
16. Puskesmas Cempaka Mulia	1.278.590.300,-
17. Puskesmas Pundu	824.949.600,-
18. Puskesmas Parenggean-I	1.625.628.571,-
19. Puskesmas Parenggean-II	536.184.800,-
20. Puskesmas Tualan Hulu	235.713.000,-
21. Puskesmas Kuala Kuayan	1.156.575.756,-
22. Puskesmas Tumbang Penyahuan	475.762.960,-
23. Puskesmas Tumbang Sangai	977.237.300,-
24. Puskesmas Tumbang Kalang	770.340.200,-
25. Labkesda	2.635.000.000,-
26. Gudang Farmasi	158.500.000,-

## V. PENUTUP

Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Sebagai sebuah investasi dan menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia, dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Tolok ukur pencapaiannya ditandai oleh penduduknya yang memiliki derajat kesehatan yang optimal, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki perlindungan atau jaminan kesehatan ketika mengalami musibah kesakitan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan Satuan Kerja Organisasi Daerah yang mengemban tanggung jawab untuk mengkoordinir dan melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut SOPD Dinas Kesehatan menyusun rencana kerja pertahun. Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja tersebut setelah mendengarkan masukan masyarakat melalui forum musrenbang dan forum SOPD dan melalui pembahasan dengan tim anggaran maka disusunlah Rancangan Rencana Kerja tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023. Beberapa kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan telah dirumuskan dalam rencana kerja Tahun 2023 sesuai dengan rencana Pencapaian ndikator Kinerja SOPD maupun penetapan kinerja SOPD Dinas Kesehatan.

